



Efektivitas Penggunaan Politik Identitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lahat 2024

Abdi Rahmanda

UIN Raden Fatah Palembang

Komaruddin

UIN Raden Fatah Palembang

Deany Afriany

UIN Raden Fatah Palembang

Alamat: Kampus

Korespondensi penulis: abdirahmanda@gmail.com

Abstract. *This research is based on the fact that in Lahat Regency, the 2024 Pilkada presents three candidate pairs who still use their identity as native sons and daughters of the region to attract public participation. The three candidate pairs are candidate number 01 Yulius Maulana paired with Budiarto Marsul, candidate number 02 Bursah Zarnubi paired with Widia Ningsih, and candidate number 03 Lidyawati paired with Haryanto. Therefore, this study aims to determine the use and impact of identity politics as a campaign strategy in the 2024 Lahat Regency Pilkada. This study uses a qualitative approach, with the main data source being interviews with research informants. Then the data is analyzed using the identity politics theory of Pierre Van Den Bergh (1987). The results of the study show that in general, the identity politics strategy implemented in the 2024 Lahat Regency Pilkada did not cause significant conflict or social division. On the contrary, local identities that are built inclusively are able to strengthen social cohesion and a spirit of togetherness between communities. Local cultural narratives, slogans based on regional similarities, and participatory approaches create a harmonious communication space between candidates and the community. However, social dynamics such as gender-based resistance and perceptions of dynastic politics remain challenges, especially for female candidate pairs. However, overall, identity politics that are carried out ethically, proportionally, and adaptively have succeeded in becoming an effective strategy in strengthening the relationship between political leaders and the community of Lahat Regency.*

Keywords: *Identity Politics, Lahat Regency, Regional Head Election*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa di Kabupaten Lahat, Pilkada 2024 menghadirkan tiga pasangan calon yang masih memanfaatkan identitasnya sebagai putra putri asli daerah untuk dapat menarik partisipasi masyarakat. Ketiga Pasangan Calon tersebut yaitu nomor urut 01 Yulius Maulana berpasangan dengan Budiarto Marsul, nomor urut 02 Bursah Zarnubi berpasangan dengan Widia Ningsih, dan nomor urut 03 Lidyawati berpasangan Haryanto. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan

mengetahui penggunaan dan dampak politik identitas sebagai strategi kampanye dalam pilkada kabupaten lahat 2024. Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif, dengan sumber data utama yaitu wawancara kepada informan penelitian. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan teori politik identitas dari Pierre Van Den Bergh (1987). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, strategi politik identitas yang dijalankan dalam Pilkada Kabupaten Lahat tahun 2024 tidak menimbulkan konflik atau perpecahan sosial yang signifikan. Justru sebaliknya, identitas lokal yang dibangun secara inklusif mampu memperkuat kohesi sosial dan semangat kebersamaan antar komunitas. Narasi kebudayaan lokal, slogan berbasis kesamaan daerah, serta pendekatan partisipatif menciptakan ruang komunikasi yang harmonis antara calon dan masyarakat. Meski demikian, dinamika sosial seperti resistensi berbasis gender dan persepsi politik dinasti tetap menjadi tantangan tersendiri, khususnya terhadap pasangan calon perempuan. Namun secara keseluruhan, politik identitas yang dijalankan secara etis, proporsional, dan adaptif telah berhasil menjadi strategi efektif dalam memperkuat hubungan antara pemimpin politik dan masyarakat Kabupaten Lahat.

Kata kunci: Kabupaten Lahat, Pemilihan Kepala Daerah, Politik Identitas.

LATAR BELAKANG

Politik identitas merupakan politik yang fokus utama kajian dan permasalahannya menyangkut perbedaan-perbedaan yang didasarkan atas asumsi-asumsi fisik tubuh, politik etnisitas atau primordialisme, dan pertentangan agama, kepercayaan atau bahasa (Abdilah dalam Yadin, 2023). Pengertian etnis adalah kelompok yang berbeda dari kelompok yang lain dalam suatu masyarakat dilihat dari aspek budaya. Dengan kata lain, etnis adalah kelompok yang memiliki ciri-ciri budaya yang membedakannya dari kelompok yang lain. Ciri khas budaya yang membedakannya dari kelompok etnis yang lain terlihat dalam aspek kekhasan sejarah, nenek moyang, bahasa dan simbol-simbol yang lain seperti pakaian, agama, dan tradisi (Darity dalam Yadin, 2023).

Identitas bukan hanya persoalan belonging semata, tetapi saat ini identitas bertransformasi sebagai alat politik dalam menarik simpati publik. Semakin lama, identitas menjadi alat komoditi bagi kandidat yang maju dalam pemilihan khususnya dalam area lokal. Kontestasi demokrasi yang sifatnya lokal membuat banyaknya kandidat yang mengusung tema etnis dengan dalih mewakili kelompok tertentu. Hal ini menyebabkan kandidat yang berasal dari kelompok tertentu menggunakan sentimen etnis untuk mendapat dukungan dari pemilih. Pada kontestasi demokrasi baik di tingkat nasional maupun lokal, peran politik identitas etnis memiliki peran andil sebagai basis mencapai kekuasaan.

Politik identitas etnis dalam istilah lain dipolitisasi untuk kepentingan politik, tujuannya adalah supaya setiap individu dalam menentukan pilihan di dasarkan pada pengidentifikasian kesamaan etnis, dalam kata lain program-program yang dikampanyekan oleh kontestan tidak menjadi bahan referensi utama pemilih. Pemandangan seperti ini dalam kontestasi demokrasi sudah menjadi hal yang lumrah. Politisasi identitas etnis dalam merebut kekuasaan politik pada praktiknya dinilai berhasil, beberapa penelitian menunjukkan bahwa peran etnisitas sebagai jargon dalam mempengaruhi pemilih menjadi bagian terpenting dalam kontestasi politik. Eksistensi etnis oleh sebagian politisi dimanfaatkan demi mencapai kekuasaan. Dalam hal ini, komunikasi politik yang dilakukan oleh politisi dengan masyarakatnya cenderung menekankan terbentuknya suatu persepsi yang sama. Realitas kontribusi etnis dalam politik telah membudaya dalam setiap ajang kontestasi demokrasi (Yadin, 2023).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu mekanisme demokrasi yang memberikan masyarakat kesempatan untuk memilih pemimpin lokal secara langsung. Pilkada memiliki peran penting dalam membentuk pemerintahan yang dapat merepresentasikan aspirasi rakyat. Di Kabupaten Lahat, Pilkada 2024 menghadirkan tiga pasangan calon yang masih memanfaatkan identitasnya sebagai putra putri asli daerah untuk dapat menarik partisipasi masyarakat. Ketiga Pasangan Calon tersebut yaitu nomor urut 01 Yulius Maulana berpasangan dengan Budiarto Marsul, nomor urut 02 Bursah Zarnubi berpasangan dengan Widia Ningsih, dan nomor urut 03 Lidyawati berpasangan Haryanto.

Pada pasangan 01 yaitu Yulius Maulana dan Budiarto Marsul yang memanfaatkan identitas mereka sebagai putra daerah untuk menggalang dukungan dari berbagai wilayah. Identitas ini berfungsi sebagai strategi dalam menarik simpati pemilih, terutama dari Kikim Barat dan Tanjung Sakti sebagai daerah asal Yulius dan Budiarto. Kehadiran kedua tokoh ini dianggap mampu mewakili aspirasi masyarakat Lahat secara keseluruhan, bukan hanya terbatas pada wilayah asal mereka (Lahathotline.com, 2024). Sebagai putra asli Kikim Barat dan Tanjung Sakti, Yulius Maulana dan Budiarto Marsul memperoleh dukungan luas dari masyarakat yang mengidentifikasi mereka sebagai "*orang Lahat asli*." Keberadaan mereka dalam kontestasi ini memperkuat hubungan emosional antara calon dengan pemilih, yang menganggap keduanya memiliki pemahaman mendalam akan kebutuhan dan nilai-nilai lokal. Acara sedekah balek dusun

di Desa Suka Merindu yang dihadiri ribuan warga mencerminkan antusiasme masyarakat Lahat untuk mendukung calon dari wilayah mereka.

Media turut memperkuat persepsi masyarakat tentang identitas dan latar belakang calon. Yulius Maulana dan pihak keluarga secara terbuka mengklarifikasi bahwa dirinya memiliki garis keturunan dari Desa Suka Merindu, Kikim Barat. Dilansir dari Nusantaraterkini.com, Yulius menyatakan bahwa neneknya berasal dari Kikim Barat, dan dirinya juga sempat mengenyam pendidikan di Lahat. Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengukuhkan identitasnya sebagai calon bupati yang benar-benar merepresentasikan aspirasi masyarakat Kabupaten Lahat (Nusantaraterkini.com, 2024).

Sedangkan pada pasangan Bursah Zarnubi dan Widia Ningsih memanfaatkan identitas mereka yang lahir di Kabupaten Lahat untuk membangun Lahat dari desa serta menggunakan jargon atau menggunakan tagar “*Asli Jeme Kite*” dan “*Sayangi Lahat*”. Selain itu dengan identitas yang mereka miliki dijadikan sebagai kunci untuk melakukan perubahan dengan menempatkan sasaran kampanye utama kepada generasi muda. Kepemimpinan Bursah Zarnubi memiliki rekam jejak sebagai aktivis pro-demokrasi dan politikus nasional yang menjadikan sosok Bursah Zarnubi dianggap dapat memberikan perubahan Kabupaten Lahat menuju masa depan yang baik (Putra, 2024). Dalam suatu pertemuan Bursah Zarnubi, menghadiri acara Pertemuan Rutin dan arisan keluarga Kikim Area Lahat (IKKAL) di Perumnas Griya Rafika 3, Desa Tanjung Payang, Kecamatan Lahat Selatan kabupaten Lahat. Pada pertemuan tersebut alah satu tokoh masyarakat Khairudin, turut memberikan sambutan yang menguatkan dukungan bagi Bursah Zarnubi, Dalam pesannya, Khairudin menekankan pentingnya persatuan dan solidaritas masyarakat Kikim Area untuk memenangkan Bursah.

Sebagai calon yang asli berasal dari Kikim dalam komitmennya beliau menyampaikan bahwa selain infrastruktur, Bursah menekankan programnya untuk membantu masyarakat miskin dan memastikan pendidikan yang layak bagi anak-anak Kikim. Ia berjanji akan menjadikan kebutuhan warga sebagai tanggung jawab pemerintah daerah jika dirinya terpilih nanti. Bursah juga menyampaikan komitmennya dalam membangun fasilitas dan infrastruktur di Kikim, termasuk pasar di Kikim dan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan masyarakat (Yoki, 2024).

Berbeda dengan pasangan lain yang memang asli kelahiran Lahat, Lidyawati merupakan kelahiran Kota Palembang dan memiliki latar belakang pendidikan di

Kabupaten Muara Enim namun telah memutuskan untuk tinggal di Lahat, dan seperti yang telah diketahui bahwa beliau merupakan istri dari Cik Ujang yang merupakan Bupati Lahat periode 2018-2023. Pada pencalonannya Lidyawati berpasangan dengan Haryanto sebagai wakilnya yang memang lahir di Lahat. Dengan latar belakang tersebut dijadikan sebagai salah satu hal yang digunakan untuk dapat mempengaruhi masyarakat, seperti yang terjadi dalam suatu pertemuan saat Calon Wakil Bupati Lahat yang mendampingi Hj Lidyawati, sebagai calon Bupati Lahat, memenuhi undangan dari warga di Kecamatan Mulak Ulu dan Kecamatan Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat. Antusias yang ditunjukkan warga ini bukan tanpa alasan. Warga berharap pasangan Lidyawati dan Haryanto, terpilih sebagai Bupati Lahat dan wakil Bupati Lahat, melanjutkan pembangunan yang sebelumnya telah digagas Bupati Lahat Cik Ujang dan H Haryanto.

Identitas politik di Kabupaten Lahat pada pilkada tahun 2024 juga mencerminkan bagaimana strategi primordialisme, konstruksionis, dan instrumental, menurut teori politik identitas Van Den Bergh, dapat dimanfaatkan untuk memengaruhi pemilih. Pada Pilkada Lahat, masyarakat cenderung memperkuat solidaritas politik berdasarkan keterikatan pada nilai-nilai lokal yang diperjuangkan calon bupati dan wakil bupati. Penelitian oleh Dian Ariyani Surya dan rekannya (2021) menunjukkan bahwa dalam pemilihan lokal, politik identitas berbasis wilayah dapat memperkuat dukungan dalam masyarakat yang menjunjung nilai-nilai kedaerahan. Dalam konteks ini, Pilkada Lahat menunjukkan kecenderungan serupa, di mana masyarakat yang memiliki ikatan kultural yang kuat cenderung mendukung calon yang dianggap representatif dari kelompok atau wilayah mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa ikatan emosional berbasis identitas lokal dapat menjadi landasan penting dalam membangun konsolidasi dukungan di tengah masyarakat yang memiliki keterikatan kultural dengan tanah kelahirannya (Lahathotline.com, 2024). Penelitian oleh Aswir F. Badjodah dan Bakri La Suhu (2019) menunjukkan bahwa politik identitas di Pilkada Maluku Utara 2013 memainkan peran penting dalam meningkatkan dukungan terhadap calon yang dipersepsikan mewakili daerah atau kelompok etnis tertentu, sebuah fenomena yang relevan dengan situasi di Kabupaten Lahat.

Selain itu, karakteristik sosial budaya masyarakat Lahat yang beragam memberikan peluang bagi calon yang memang berasal dari Lahat untuk menggali dukungan yang

lebih luas. Dalam masyarakat Kikim Barat, solidaritas terhadap calon dari wilayah yang sama memperlihatkan keterikatan emosional yang kuat, seperti dijelaskan oleh Gunawan (2022) dalam studinya di Pilkada Medan yang menunjukkan bahwa faktor etnisitas dan kedekatan geografis dapat mempengaruhi pilihan politik masyarakat, khususnya di komunitas dengan ikatan sosial kuat. Di Kabupaten Lahat, keterikatan kedaerahan ini dapat menciptakan dukungan yang lebih solid bagi pasangan masing-masing pasangan calon dalam kontestasi Pilkada 2024.

Namun, potensi konflik yang muncul dari penggunaan politik identitas juga perlu dipertimbangkan, terutama dengan adanya perbedaan karakteristik sosial antarwilayah di Lahat. Penelitian Nur Ainun dan koleganya (2022) dalam konteks Pilkada Binjai menunjukkan bahwa politik identitas berbasis wilayah tertentu dapat memicu ketegangan di antara pendukung, terutama jika calon dianggap mengabaikan aspirasi dari wilayah lain. Di Kabupaten Lahat, perbedaan karakteristik sosial ini dapat menciptakan fragmentasi dukungan jika pasangan calon lebih berfokus pada wilayah asal mereka, yang menuntut mereka untuk membangun relasi yang lebih luas dengan pemilih lintas wilayah di Kabupaten Lahat (Ainun et al., 2022).

Secara keseluruhan, strategi politik identitas yang diterapkan calon Bupati Lahat pada pilkada tahun 2024 menekankan bahwa identitas daerah tidak sekadar menjadi simbol dalam kampanye, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun dukungan politik yang solid. Dengan cara ini, pasangan calon diharapkan dapat mempersatukan masyarakat Kabupaten Lahat, meningkatkan peluang mereka dalam memenangkan Pilkada 2024. Penelitian ini berupaya untuk mengungkap sejauh mana politik identitas yang dimainkan oleh pasangan calon Bupati Lahat berperan dalam membentuk persepsi dan dukungan pemilih, serta bagaimana pengaruhnya terhadap dinamika politik lokal di Kabupaten Lahat. Berdasarkan uraian yang telah peneliti jelaskan dalam latar belakang di atas, hal tersebutlah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai keberadaan politik identitas di Kabupaten Lahat, dengan judul **“Efektivitas Penggunaan Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana masing-masing pasangan calon Bupati

Lahat memanfaatkan politik identitas dalam Pilkada tahun 2024. Metode kualitatif ini berlandaskan pada filsafat konstruktivisme, yang memandang realitas sebagai sesuatu yang bersifat jamak, interaktif, dan memerlukan interpretasi berdasarkan pengalaman sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana individu atau kelompok membentuk makna terhadap suatu fenomena melalui pengalaman dan interaksi sosial mereka

Menurut Kirk dan Miller (dalam Zuriah, 2001:189), penelitian kualitatif adalah suatu tradisi dalam ilmu sosial yang bergantung pada pengamatan langsung terhadap manusia dalam konteks kehidupan nyata, di mana peneliti terlibat secara langsung dengan partisipan, menggunakan bahasa dan perspektif mereka. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menangkap berbagai dimensi sosial yang kompleks, yang sering kali tidak bisa dijelaskan dengan pendekatan kuantitatif (Zuriah, 2001).

Metode kualitatif menekankan pada pemahaman yang mendalam atas suatu masalah dibandingkan dengan generalisasi. Oleh karena itu, metode ini menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*) yang mengkaji setiap kasus secara individu, mengingat setiap permasalahan dalam penelitian kualitatif memiliki keunikan dan konteks tersendiri yang tidak selalu dapat digeneralisasi (Sugiyono, 2013). Dengan demikian, metode ini cocok untuk meneliti fenomena politik identitas yang dinamis dan kontekstual.

Sugiyono (2013:15) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif didasarkan pada filsafat *postpositivisme* dan digunakan untuk meneliti fenomena dalam kondisi alamiah. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen kunci, sementara pengumpulan data dilakukan dengan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang berkaitan dengan kampanye politik dan strategi pasangan calon. Triangulasi data digunakan untuk memastikan validitas informasi yang diperoleh, dengan memadukan berbagai metode pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam.

Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif analitik, di mana data yang dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumen dianalisis secara langsung tanpa diubah menjadi bentuk kuantitatif. Analisis data bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola dan hubungan di antara data, yang kemudian dipresentasikan

dalam bentuk uraian naratif yang mencerminkan fenomena yang diteliti (Gunawan, 2013). Melalui pendekatan ini, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menangkap kompleksitas realitas sosial dan politik di lapangan (Gunawan, 2013).

Dari berbagai pandangan para ahli, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif tidak dimulai dari teori yang sudah ditetapkan sebelumnya, tetapi dari data yang diperoleh secara langsung dari partisipan di lingkungan alami. Penelitian kualitatif menghasilkan deskripsi atau analisis yang kaya akan makna, bukan hasil dari manipulasi variabel-variabel tertentu. Oleh karena itu, metode kualitatif ini dipilih dalam penelitian ini untuk memahami secara komprehensif dinamika politik identitas dan strategi yang digunakan oleh pasangan calon dalam Pilkada Lahat 2024. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti diharapkan dapat menangkap makna dari tindakan dan strategi pasangan calon dalam membangun dukungan politik berbasis identitas kedaerahan, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian bab ini, peneliti akan memaparkan hasil dari penelitian mengenai efektivitas penggunaan politik identitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam pendekatan kualitatif, metode utama yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan informan kunci yang terlibat langsung dalam proses kampanye dan kemenangan calon kepala daerah.

Melalui teknik wawancara, data yang diperoleh dianalisis untuk menjawab rumusan masalah utama dalam penelitian ini, yaitu bagaimana efektivitas dimensi politik identitas baik primordialisme, konstruksionalisme, maupun instrumentalisme dalam memengaruhi strategi kampanye dan preferensi pemilih di Kabupaten Lahat pada Pilkada tahun 2024.

Politik Identitas Sebagai Strategi Kampanye dalam Pilkada Kabupaten Lahat 2024

Politik identitas dalam konteks pemilihan kepala daerah sering kali menjadi strategi efektif untuk membangun kedekatan emosional antara calon kepala daerah dan konstituen. Dalam Pilkada Kabupaten Lahat tahun 2024, fenomena ini muncul dengan sangat jelas, di mana ketiga pasangan calon memanfaatkan identitas lokal sebagai modal politik utama untuk memperoleh dukungan masyarakat. Identitas yang dimaksud mencakup asal-usul daerah, hubungan kultural, kedekatan emosional, serta kesinambungan dari rezim pemerintahan sebelumnya. Ketiga pasangan calon

menampilkan identitas tersebut dalam berbagai bentuk, baik melalui slogan, program, narasi kampanye, maupun komposisi pasangan itu sendiri.

Paslon 01, Yulius Maulana dan Budiarto Marsul, menekankan identitas sebagai putra daerah Kabupaten Lahat. Yulius berasal dari wilayah Kikim Barat dan Budiarto dari Tanjung Sakti, dua wilayah yang memiliki basis sosial dan budaya yang kuat di daerah tersebut. Dalam wawancara dengan Yeri Mediansyah, Ketua Tim YMBM, ia menyatakan bahwa “secara emosional, masyarakat lebih dekat dengan Yulius Maulana dibandingkan calon lain,” karena keterikatan geografis dan latar belakang sosial yang sudah dikenal masyarakat (Wawancara, 25 April 2025). Identitas sebagai ‘jeme kite’ (orang kita) menjadi titik temu antara pasangan calon dan masyarakat.

Senada dengan hal tersebut, Jalaludin selaku Bendahara Tim menyatakan, “kalau pak Budiarto di daerah Tanjung Sakti umum dikenal karena sebelumnya pernah menjabat wakil walikota Pagaram dan DPRD Provinsi. Jadi masyarakat merasa dekat dan percaya pada rekam jejak beliau” (Wawancara, 26 April 2025). Dalam hal ini, politik identitas tidak hanya digunakan dalam konteks etnisitas atau kesamaan daerah asal, tetapi juga dikaitkan dengan pengalaman dan kontribusi yang telah diberikan kepada masyarakat sebelumnya.

Paslon 02, Bursah Zarnubi dan Widia Ningsih, mengusung pendekatan yang sangat kuat terhadap identitas lokal dengan mengangkat slogan “Jeme Kite.” Slogan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat retorik, tetapi juga menjadi identitas kolektif yang mampu menyatukan masyarakat lintas wilayah di Kabupaten Lahat. Syukron Oktadiansyah, Ketua Koordinator Saksi Dapil 6 sekaligus Bendahara DPD Golkar, mengungkapkan bahwa “narasi Jeme Kite hidup dan melekat dalam keseharian masyarakat, serta menjadi bagian dari kearifan lokal yang terus dilestarikan” (Wawancara, 23 April 2025). Strategi ini membuktikan bahwa identitas lokal dapat diperluas menjadi simbol persatuan dan harapan kolektif terhadap pemimpin yang berasal dari komunitas sendiri.

Lebih jauh, pendekatan Paslon 02 juga menyentuh dimensi generasi. Menurut Elfis Sisdy Ariansyah, Wakil Ketua Timses Kecamatan Tanjung Tebat, “kalangan muda di Kabupaten Lahat, khususnya generasi milenial, menunjukkan kebanggaan terhadap pasangan calon yang berasal dari daerah mereka sendiri” (Wawancara, 21 April 2025). Hal ini menunjukkan bahwa politik identitas tidak terbatas pada generasi tua yang

konservatif, tetapi juga menjangkau generasi muda yang merasa terhubung secara emosional dengan calon yang memiliki akar budaya dan sosial yang sama.

Sementara itu, Paslon 03, Lidyawati dan Haryanto, juga menggunakan pendekatan politik identitas dengan menekankan kesinambungan dari pemerintahan sebelumnya. Haryanto sebagai mantan Wakil Bupati Lahat, dan Lidyawati sebagai istri dari Cik Ujang (mantan Bupati), menjadi simbol kesinambungan dan stabilitas pemerintahan. Dalam wawancara dengan Virza Yuni, Bendahara Posko Berlian, dijelaskan bahwa “pembangunan yang dilakukan Haryanto saat menjabat Wakil Bupati cukup terasa di berbagai wilayah” (Wawancara, 28 April 2025). Dengan demikian, identitas yang mereka bawa tidak hanya berbasis geografis, tetapi juga pada memori kolektif terhadap kepemimpinan sebelumnya.

Namun, strategi pasangan ini tidak lepas dari tantangan. Umi Parizal dari DPAC Partai Demokrat Tanjung Tebat mengungkapkan, “ada sebagian masyarakat yang menolak karena belum siap dipimpin oleh sosok perempuan” (Wawancara, 25 April 2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa politik identitas juga memiliki batas-batas sosial, khususnya dalam hal penerimaan terhadap pemimpin perempuan yang belum sepenuhnya inklusif di beberapa dapil.

Untuk mengatasi hal ini, tim Lidyawati-Haryanto membangun narasi bahwa Lidyawati adalah bagian dari masyarakat Lahat melalui keterlibatannya dalam kegiatan sosial dan pemerintahan sebelumnya. Windo Raja Saputra, DPAC Demokrat Kecamatan Kota Agung, menegaskan bahwa “ibu Lidyawati memang dekat dengan masyarakat dan tidak bergantung sepenuhnya pada Haryanto” (Wawancara, 26 April 2025). Pernyataan ini memperlihatkan bahwa meskipun terdapat resistensi, tim sukses berupaya membangun citra Lidyawati sebagai pemimpin yang mandiri dan terhubung langsung dengan masyarakat.

Dari ketiga pasangan calon, terlihat bahwa strategi politik identitas dijalankan secara sistematis dan terstruktur. Tidak hanya sebagai simbol, tetapi juga sebagai bentuk komunikasi politik yang menyentuh aspek kultural dan emosional masyarakat. Strategi ini diterjemahkan dalam bentuk kampanye dialogis, pendekatan berbasis komunitas, penggunaan bahasa lokal, serta pemanfaatan figur-figur sosial yang dianggap mewakili identitas masyarakat setempat.

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan berbagai informan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Lahat cenderung menerima narasi identitas lokal dengan positif, sejauh narasi tersebut tidak menimbulkan eksklusivitas. “Tidak ada resistensi dari masyarakat terhadap simbol-simbol lokal yang digunakan dalam kampanye,” kata Hartono, Ketua Koordinator Kecamatan Pagar Gunung (Wawancara, 28 April 2025). Ini menunjukkan bahwa penggunaan politik identitas dalam Pilkada Lahat 2024 relatif diterima dengan baik oleh masyarakat dari berbagai latar belakang sosial.

Namun demikian, penting dicatat bahwa politik identitas hanya akan efektif apabila dikombinasikan dengan program-program nyata dan rekam jejak yang jelas. Sebagaimana dinyatakan oleh Elga Yandasyah dari PKB, “meskipun identitas lokal penting, faktor kemampuan finansial dan jaringan politik juga harus dipertimbangkan” (Wawancara, 27 April 2025). Hal ini menunjukkan bahwa dalam politik lokal modern, pemilih semakin rasional dan mempertimbangkan berbagai variabel dalam menentukan pilihannya.

Secara keseluruhan, politik identitas dalam Pilkada Kabupaten Lahat 2024 merupakan strategi yang dominan digunakan oleh ketiga pasangan calon. Masing-masing pasangan menggunakan pendekatan yang berbeda dalam membangun identitas mereka di hadapan masyarakat, baik melalui narasi kultural, kesinambungan pemerintahan, maupun keterlibatan sosial. Keberhasilan dari strategi ini sangat tergantung pada kemampuan calon dan tim sukses untuk mengemas identitas lokal menjadi narasi politik yang inklusif, aspiratif, dan mampu merespons kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Lahat.

Dimensi Primordialisme dalam Kampanye Politik

Primordialisme merupakan salah satu dimensi penting dalam teori politik identitas yang menekankan pada keterikatan individu terhadap kelompok berbasis ikatan asal-usul, etnisitas, bahasa, agama, atau hubungan kekerabatan. Dalam konteks politik elektoral lokal seperti Pilkada Kabupaten Lahat tahun 2024, dimensi primordial digunakan secara sadar oleh pasangan calon sebagai strategi komunikasi politik untuk membentuk ikatan emosional dengan pemilih.

Pasangan calon nomor urut satu, Yulius Maulana – Budiarto Marsul, menggunakan pendekatan primordialisme dengan menekankan identitas sebagai “putra asli Lahat.” Dalam berbagai kesempatan kampanye, narasi tentang keterikatan geografis, sejarah

sosial, dan hubungan emosional dengan masyarakat lokal menjadi bagian dari strategi mereka. Dalam wawancara, Yeri Mediansyah (Ketua Tim YMBM) menyatakan bahwa “masyarakat merasa lebih dekat dengan Yulius dan Budiarto karena mereka memang berasal dari Lahat, dan telah dikenal oleh masyarakat” (25 April 2025). Strategi ini memberikan efek psikologis yang kuat karena masyarakat cenderung menilai pemimpin berdasarkan kedekatan identitas.

Penekanan pada status “putra daerah” bukan hanya berfungsi sebagai legitimasi personal, tetapi juga digunakan untuk membangun kredibilitas elektoral. Jalaludin, Bendahara Tim YMBM, menambahkan bahwa “Pak Budiarto dikenal luas karena pernah menjabat wakil wali kota dan DPRD provinsi. Itu membuat masyarakat lebih percaya karena beliau bukan orang baru” (26 April 2025). Dengan demikian, status sebagai putra daerah juga berkaitan erat dengan pengalaman politik yang dimaknai sebagai komitmen terhadap pembangunan lokal.

Namun, penting dicatat bahwa tidak seluruh elemen masyarakat menanggapi strategi primordial ini secara seragam. Muhammad Sangkut dari PKS menilai bahwa faktor daerah asal bukan satu-satunya pertimbangan pemilih. Ia menyatakan bahwa “masyarakat lebih mempertimbangkan wawasan dan pengalaman calon, bukan sekadar asal daerahnya” (26 April 2025). Ini menunjukkan bahwa pendekatan primordial tidak bersifat universal dalam memengaruhi perilaku pemilih.

Berbeda dengan Paslon 01, pasangan calon nomor urut dua, Bursah Zarnubi – Widia Ningsih, menggunakan pendekatan primordial yang lebih luas dan kolektif. Mereka membingkai identitas lokal melalui slogan “Jeme Kite”, yang dalam konteks masyarakat Lahat bermakna ‘kita sendiri’ atau ‘dari kalangan kita’. Slogan ini memiliki daya resonansi tinggi karena tidak hanya menegaskan asal-usul lokal, tetapi juga membangun semangat kebersamaan dan kedaerahan.

Menurut Syukron Oktadiansyah, Bendahara DPD Golkar Lahat, “slogan ‘Jeme Kite’ menjadi semacam simbol kebanggaan bersama yang mampu membangkitkan semangat solidaritas lokal di tengah masyarakat” (23 April 2025). Strategi ini terbukti efektif dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda. Elfis Sisdy Ariansyah menambahkan bahwa “pemilih milenial merasa bangga mendukung pasangan yang berasal dari daerah mereka sendiri” (21 April 2025). Hal ini mencerminkan bahwa pendekatan primordial pasangan ini bersifat menyatukan dan inklusif.

Selain menyasar basis emosional, pasangan Bursah–Widia juga memperkuat narasi mereka dengan komunikasi berbasis budaya lokal. Kampanye mereka menampilkan bahasa daerah, simbol-simbol adat, dan logat dusun sebagai bentuk representasi yang autentik. Dalam wawancara dengan Hartono, Ketua Koordinator Kecamatan Pagar Gunung, ia menyatakan bahwa “kampanye yang menampilkan unsur budaya lokal cenderung lebih diterima, karena dianggap mewakili identitas bersama” (28 April 2025). Ini membuktikan bahwa aspek budaya dalam primordialisme berperan signifikan dalam membentuk persepsi positif pemilih.

Sementara itu, Paslon 03, Lidyawati – Haryanto, menampilkan strategi primordialisme yang lebih terfokus pada figur Haryanto sebagai tokoh lokal yang telah dikenal luas. Haryanto berasal dari Dapil 4 (Mulak Sebingkai), wilayah yang dikenal sangat loyal terhadap kandidat asal daerah. Dalam wawancara, Andra (Ketua Tim Pemenangan Dapil 4) menyebutkan bahwa “banyak pemilih dari lingkungan kekeluargaan Bapak Haryanto memberikan dukungan penuh karena faktor asal-usul” (28 April 2025).

Namun, strategi ini tidak sepenuhnya berhasil diterapkan oleh Lidyawati. Sebagai istri mantan Bupati Cik Ujang, ia menghadapi tantangan tersendiri. Beberapa informan, seperti Umi Parizal dari Demokrat, menyampaikan bahwa “ada sebagian masyarakat yang mempertanyakan kesiapan dipimpin oleh perempuan, apalagi bukan asli Lahat” (25 April 2025). Ini menunjukkan bahwa strategi primordial tidak netral gender dan masih menghadapi resistensi sosial dalam konteks lokal.

Walaupun begitu, tim kampanye Paslon 03 tetap berupaya membangun narasi bahwa Lidyawati adalah bagian dari masyarakat Lahat melalui kegiatan sosial dan peran selama masa kepemimpinan suaminya. Windo Raja Saputra menegaskan bahwa “asal usul Ibu Lidyawati sebagai jeme kite membuat masyarakat tetap menerimanya, meskipun ada tantangan sebagai calon perempuan” (26 April 2025). Dalam hal ini, strategi primordial yang digunakan bersifat relasional dan simbolik.

Dengan demikian, pendekatan primordialisme yang diambil oleh masing-masing pasangan calon menunjukkan perbedaan strategi dan penerimaan masyarakat. Paslon 01 menggunakan pendekatan konvensional berbasis geografis dan sejarah personal. Paslon 02 menggunakan pendekatan yang lebih luas dan simbolik melalui narasi kolektif.

Sedangkan Paslon 03 memadukan kesinambungan kekuasaan dan figur lokal, namun menghadapi tantangan berbasis gender.

Dari perspektif efektivitas, strategi Paslon 02 tampak lebih inklusif dan diterima luas oleh berbagai lapisan masyarakat. Paslon 01 memperoleh efek emosional kuat di wilayah tertentu, namun bersifat terbatas. Sementara Paslon 03 mengandalkan legitimasi pemerintahan sebelumnya, tetapi perlu menanggulangi persepsi resistensi berbasis identitas gender dan kesetaraan representasi.

Secara keseluruhan, dimensi primordialisme dalam Pilkada Kabupaten Lahat 2024 menunjukkan bahwa identitas lokal tetap menjadi sumber kekuatan politik yang signifikan. Namun, penerapannya perlu disesuaikan dengan dinamika sosial masyarakat yang semakin rasional dan plural. Strategi identitas yang bersifat inklusif, kolaboratif, dan tidak eksklusif lebih cenderung mendapat penerimaan yang positif dari masyarakat pemilih.

Berikut adalah tabel 4.1 komparatif untuk memperjelas pendekatan ketiga pasangan calon dalam memanfaatkan dimensi primordialisme:

Tabel 1. Komparasi Strategi Primordialisme Tiga Pasangan Calon Pilkada Lahat 2024

Aspek	Paslon 01 (Yulius-Budiarto)	Paslon 02 (Bursah-Widia)	Paslon 03 (Lidyawati-Haryanto)
Fokus Identitas	Putra daerah Kikim Barat & Tanjung Sakti	“Jeme Kite” sebagai simbol kolektif	Haryanto sebagai figur lokal kuat, Lidyawati sebagai representasi kelanjutan
Narasi Utama	Kedekatan emosional dan pengalaman lokal	Kebanggaan bersama, solidaritas komunitas	Warisan pemerintahan sebelumnya, koneksi sosial
Efektivitas Emosional	Tinggi di wilayah asal, rendah di luar basis	Merata dan luas di seluruh wilayah	Tinggi di Dapil 4, resistensi pada Lidyawati di sebagian wilayah
Kendala	Kurang inklusif secara lintas dapil	Hampir tidak ada resistensi	Isu gender dan keaslian daerah terhadap calon perempuan
Penerimaan Publik	Cenderung lokal-spesifik	Inklusif dan simbolis	Campuran karena tergantung pada

	persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan
--	--

(Sumber: Diolah Penulis, 2025)

Tabel 4.1 di atas memperlihatkan bahwa Paslon 02 (Bursah-Widia) lebih unggul dalam membangun narasi identitas yang inklusif dan diterima luas di seluruh wilayah. Sebaliknya, Paslon 01 cenderung kuat di basis tertentu saja, dan Paslon 03 menghadapi hambatan kultural terkait gender dan warisan kekuasaan yang belum tentu sepenuhnya diterima oleh masyarakat lintas dapil.

Dimensi Konstruksionalisme dalam Identitas yang Dibangun secara Politik

Dalam teori politik identitas, konstruksionalisme memandang bahwa identitas politik bukanlah sesuatu yang bersifat bawaan, melainkan sesuatu yang dapat dibentuk, dikembangkan, dan direproduksi secara sosial melalui strategi komunikasi, simbol, narasi, dan representasi politik. Dalam konteks Pilkada Kabupaten Lahat 2024, konstruksi identitas dilakukan oleh ketiga pasangan calon melalui berbagai pendekatan, seperti penyusunan narasi politik, penggunaan media sosial, penyusunan komposisi pasangan, hingga pelibatan tokoh masyarakat dari berbagai wilayah.

Pasangan calon nomor urut satu, Yulius Maulana dan Budiarto Marsul, mengonstruksi identitas mereka tidak hanya dengan mengandalkan status sebagai "putra daerah", melainkan juga dengan membangun persepsi sebagai pemimpin lintas wilayah. Salah satu strategi yang mereka gunakan adalah pelibatan tokoh masyarakat dari seluruh dapil dalam tim kampanye. Dalam wawancara dengan Irwansyah, salah satu koordinator kecamatan dari dapil 3, ia menyampaikan bahwa “pendekatan yang digunakan oleh tim Yulius-Budiarto sangat menghargai keberagaman dapil. Setiap wilayah diberi ruang untuk terlibat aktif dalam perencanaan kampanye” (Wawancara, 24 April 2025).

Identitas mereka juga dibangun melalui komunikasi yang konsisten di berbagai wilayah, dengan menyesuaikan pesan kampanye sesuai dengan karakteristik sosial-budaya setempat. Mereka menghindari narasi yang terlalu eksklusif dan memilih untuk menggunakan pendekatan yang menyeluruh dan inklusif. Sulastri, tokoh perempuan dari Kecamatan Tanjung Aur (Dapil 7), menyebutkan bahwa “di desa kami, Yulius tidak hanya datang berkampanye, tapi juga mendengarkan keluhan warga dan berdialog langsung, ini memperkuat kedekatan personal” (Wawancara, 25 April 2025). Interaksi

semacam ini membentuk identitas calon sebagai sosok yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, konstruksi identitas pasangan ini diperkuat melalui narasi perubahan dan pengalaman birokrasi. Dengan rekam jejak di pemerintahan dan parlemen, Yulius dan Budiarto membentuk citra sebagai pemimpin yang kompeten secara teknokratik sekaligus memahami aspirasi rakyat. Hal ini menjadi penyeimbang atas identitas geografis mereka, sehingga narasi yang dibangun tidak stagnan dalam wilayah asal semata, melainkan lebih universal dan solutif.

Berbeda dengan Paslon 01, pasangan calon nomor urut dua, Bursah Zarnubi dan Widia Ningsih, menyusun konstruksi identitas politik mereka melalui pendekatan yang lebih sistematis, simbolik, dan multisegmentasi. Komposisi pasangan ini sendiri dirancang untuk merepresentasikan keragaman sosial, baik dari segi usia, jenis kelamin, maupun latar belakang profesional. Bursah sebagai tokoh senior dengan pengalaman nasional, dipasangkan dengan Widia sebagai perempuan muda yang aktif di komunitas lokal, menjadi simbol keberpihakan pada inklusivitas dan keseimbangan representasi.

Dalam wawancara, Elga Yandrasyah, koordinator Kecamatan Kota Agung dari PKB, menjelaskan bahwa “pasangan ini dirancang untuk menjangkau semua segmen: dari pemuda, perempuan, hingga kelompok masyarakat desa. Mereka konsisten menyampaikan narasi keterwakilan dan membangun komunikasi dua arah dalam setiap kunjungan” (Wawancara, 27 April 2025). Strategi ini terlihat efektif dalam membentuk persepsi masyarakat bahwa pasangan Bursah-Widia adalah representasi dari semua lapisan sosial.

Konstruksi identitas mereka juga diformulasikan secara profesional melalui penggunaan media sosial dan slogan kampanye. Slogan “Menata Kota, Membangun Desa” menjadi perpanjangan tangan dari narasi “Jeme Kite” dan memperkuat positioning sebagai pasangan yang berpihak pada pemerataan pembangunan. Menurut Albert, Koordinator Kecamatan Mulak Ulu, “media sosial mereka aktif menyampaikan visi dan misi, program-program diunggah dengan gaya yang mudah dipahami masyarakat desa sekalipun” (Wawancara, 27 April 2025). Pendekatan ini menjadikan identitas pasangan bukan hanya naratif, tetapi juga visual dan digital.

Simbol identitas politik Paslon 02 juga dibentuk melalui partisipasi aktif di berbagai ruang sosial. Kampanye mereka mengadopsi pola dialogis dengan pendekatan “bottom-

up”, yang melibatkan komunitas lokal dalam merumuskan aspirasi. Hal ini menjadikan identitas mereka bersifat reflektif, tidak didasarkan pada asumsi, melainkan dibentuk melalui interaksi langsung dengan masyarakat.

Sementara itu, pasangan calon nomor urut tiga, Lidyawati dan Haryanto, mengonstruksi identitas politik melalui narasi keberlanjutan pemerintahan dan penguatan citra sosial. Lidyawati, sebagai istri dari Bupati sebelumnya (Cik Ujang), dibingkai sebagai penerus program-program strategis yang belum selesai dilaksanakan. Sedangkan Haryanto, sebagai Wakil Bupati aktif pada periode sebelumnya, dianggap sebagai simbol kontinuitas birokratis. Menurut Andra, koordinator tim dari dapil 4, “kekuatan utama pasangan ini ada pada keberlanjutan. Masyarakat mengenal mereka bukan hanya karena jabatan, tapi karena kedekatan sosial dan kontribusinya selama ini” (Wawancara, 28 April 2025).

Namun, identitas Lidyawati tidak hanya dibentuk dari warisan politik suaminya. Ia juga aktif dalam kegiatan sosial dan organisasi perempuan selama masa pemerintahan sebelumnya. Ini menjadi fondasi konstruksi identitas yang bersifat personal dan sosial. Virza Yuni dari tim relawan Berlian menyatakan bahwa “ibu Lidyawati sering hadir di kegiatan masyarakat, bukan sekadar mendampingi suami, tapi sebagai pelaku aktif” (Wawancara, 28 April 2025). Pendekatan ini membentuk citra bahwa Lidyawati adalah bagian dari masyarakat, bukan sekadar pelanjut kekuasaan.

Citra Lidyawati juga dikonstruksi untuk menjawab tantangan resistensi terhadap kepemimpinan perempuan. Tim suksesnya melakukan pendekatan edukatif melalui pertemuan komunitas dan diskusi publik untuk menyampaikan bahwa kepemimpinan perempuan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan bagian dari dinamika demokrasi lokal yang inklusif. Dalam hal ini, identitas politik dibentuk melalui negosiasi nilai sosial dan persepsi gender yang berlaku di masyarakat.

Kampanye Paslon 03 juga memperkuat konstruksi identitas dengan menonjolkan peran-peran positif yang dijalankan selama menjabat. Program berobat gratis dan pembangunan jalan menjadi bukti nyata dari keberlanjutan yang mereka usung. Dalam berbagai baliho dan media kampanye, mereka menggunakan slogan “Lanjutkan Pembangunan, Perkuat Pelayanan,” sebagai simbol dari kesinambungan kebijakan yang telah dirasakan langsung oleh masyarakat.

Namun demikian, dibanding Paslon 02, strategi konstruksional Paslon 03 masih cenderung eksklusif karena bergantung pada keberhasilan masa lalu dan struktur kekuasaan. Identitas yang dibentuk bersifat vertikal dan birokratis, tidak sepenuhnya mencerminkan keterlibatan akar rumput secara langsung. Oleh karena itu, strategi ini memerlukan penyempurnaan agar mampu menjangkau kelompok pemilih yang lebih luas, khususnya generasi muda dan pemilih kritis.

Secara keseluruhan, dimensi konstruksionalisme dalam Pilkada Lahat 2024 menunjukkan bahwa identitas politik tidak bersifat statis, melainkan dibentuk dan dirancang sesuai konteks sosial dan strategi kampanye. Paslon 01 membangun identitas melalui jaringan lintas dapil dan narasi teknokratik. Paslon 02 lebih sistematis dengan pendekatan simbolik dan segmentatif. Sedangkan Paslon 03 menekankan kesinambungan kekuasaan dan warisan sosial yang dilekatkan kepada tokoh perempuan.

Dengan demikian, keberhasilan konstruksi identitas politik sangat tergantung pada kemampuan pasangan calon dalam membentuk keterwakilan yang otentik, relevan, dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Strategi yang berbasis pada dialog, narasi kebersamaan, dan penggunaan media sosial secara efektif, cenderung memberikan keunggulan kompetitif dalam meraih simpati dan legitimasi publik.

Dimensi Instrumentalisme dalam Identitas Sebagai Alat Politik Praktis

Dalam pendekatan teoritik yang dikemukakan oleh Pierre L. van den Berghe, dimensi instrumentalisme menekankan bahwa identitas dapat digunakan secara sadar dan strategis sebagai alat politik praktis untuk mencapai tujuan elektoral. Dalam konteks Pilkada Kabupaten Lahat tahun 2024, ketiga pasangan calon kepala daerah terlihat secara aktif memanfaatkan identitas lokal bukan hanya sebagai bagian dari citra, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun loyalitas pemilih, meningkatkan elektabilitas, serta memperluas jangkauan jaringan politik.

Paslon 01, Yulius Maulana – Budiarto Marsul, menggunakan identitas lokal secara cermat dan strategis untuk memperkuat basis dukungan di wilayah-wilayah kunci. Identitas sebagai putra daerah tidak hanya dimaknai secara simbolik, tetapi dijadikan sebagai modal politik untuk membangun narasi kedekatan dan representasi yang dipercaya oleh pemilih. Menurut keterangan dari Rina Sulastri, kader perempuan dari Kecamatan Tanjung Sakti PUMI, “masyarakat di daerah kami cenderung melihat siapa

yang berasal dari sini dan siapa yang benar-benar tahu kebutuhan kami, jadi kedekatan itu penting, tapi juga harus dibuktikan lewat tindakan” (Wawancara, 26 April 2025).

Paslon Yulius–Budiarto juga secara konsisten menghindari penggunaan identitas secara eksklusif. Strategi kampanye pasangan ini bersifat pragmatis dengan menekankan nilai kebersamaan lintas dapil. Ardiansyah, tokoh pemuda dari Kecamatan Mulak Ulu, menyatakan bahwa “kampanye Yulius tidak membedakan wilayah, meskipun asalnya dari Kikim, pasangan ini tetap turun ke wilayah kami dan membicarakan program, bukan hanya asal-usul” (Wawancara, 27 April 2025). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan identitas difungsikan untuk membangun jangkauan, bukan untuk menciptakan sekat sosial.

Yulius Maulana dan Budiarto Marsul juga memanfaatkan identitas dalam bentuk jaringan sosial berbasis kedaerahan. Tokoh-tokoh lokal yang memiliki pengaruh sosial dilibatkan secara aktif sebagai penghubung antara pasangan calon dan komunitas pemilih. Contohnya, di Kecamatan Suka Merindu, tim kampanye Paslon 01 menggandeng tokoh adat dan pemuka agama untuk menyampaikan visi-misi Yulius–Budiarto. Ini membuktikan bahwa identitas tidak hanya simbolik, tetapi juga operasional dalam strategi mobilisasi.

Paslon 02, Bursah Zarnubi – Widia Ningsih, menerapkan strategi instrumentalisme identitas yang bersifat luas dan terstruktur. Pasangan ini menjadikan slogan “Jeme Kite” sebagai alat komunikasi politik yang sangat efektif. Slogan tersebut berfungsi tidak hanya sebagai simbol kedekatan daerah, tetapi juga sebagai perekat emosional antarwarga dari berbagai golongan. Elfis Sisdy Ariansyah, Wakil Ketua Timses Kecamatan Tanjung Tebat, menyampaikan bahwa “Jeme Kite bukan hanya kalimat, tetapi sudah menjadi perasaan yang hidup di masyarakat. Bursah dan Widia pintar memanfaatkannya sebagai alat komunikasi yang kuat” (Wawancara, 21 April 2025).

Strategi identitas yang dijalankan oleh Bursah Zarnubi dan Widia Ningsih juga selaras dengan program-program konkrit yang ditawarkan dalam kampanye. Syukron Oktadiansyah, Bendahara DPD Golkar Kabupaten Lahat, menuturkan bahwa “identitas lokal bukan hanya dibangga-banggakan, tetapi juga digunakan untuk menyampaikan solusi. Oleh karena itu, masyarakat merasa lebih didengar oleh pasangan ini” (Wawancara, 23 April 2025). Hal ini menunjukkan bahwa identitas lokal menjadi media komunikasi kebijakan yang efektif dan tidak hanya bersifat simbolis.

Bursah dan Widia juga secara aktif menggunakan media sosial sebagai alat distribusi identitas. Tim kampanye mereka mengadopsi bahasa lokal, logat dusun, dan visual-visual khas daerah untuk memperkuat ikatan emosional dengan pemilih. Toni Firmansyah, relawan muda di Kecamatan Kikim Selatan, mengatakan bahwa “media sosial pasangan Bursah–Widia selalu pakai logat dusun dan bahasa daerah, jadi terasa lebih dekat dengan masyarakat desa” (Wawancara, 24 April 2025). Ini menunjukkan bahwa identitas digunakan secara adaptif sesuai konteks dan media komunikasi.

Sementara itu, Paslon 03, Lidyawati – Haryanto, menggunakan pendekatan instrumentalisme yang berbasis pada kesinambungan pemerintahan sebelumnya. Identitas politik pasangan ini dibentuk dari warisan kepemimpinan Cik Ujang dan pengalaman birokratis Haryanto. Dalam wawancara, Umi Parizal, dari DPAC Demokrat Kecamatan Tanjung Tebat, menyatakan bahwa “masyarakat merasa sudah melihat hasil kerja pasangan ini selama lima tahun terakhir, jadi ketika Ibu Lidyawati maju, itu dianggap sebagai lanjutan logis dari apa yang sudah ada” (Wawancara, 25 April 2025).

Namun demikian, strategi Lidyawati dan Haryanto menghadapi tantangan sosial tertentu, khususnya dalam hal representasi gender dan persepsi politik dinasti. Windo Raja Saputra, kader Partai Demokrat dari Kecamatan Kota Agung, menilai bahwa “tidak semua wilayah merasa diuntungkan dari program sebelumnya. Dan karena Ibu Lidyawati adalah perempuan, ada keraguan dari beberapa kelompok masyarakat” (Wawancara, 26 April 2025). Ini menunjukkan bahwa efektivitas strategi identitas sangat bergantung pada penerimaan sosial yang tidak seragam.

Lidyawati dan Haryanto memanfaatkan dukungan jaringan politik lama, terutama dari simpatisan Cik Ujang, untuk mempertahankan basis elektoral. Andra, Ketua Koordinator Kecamatan Dapil 4 dari Tim Pemenangan Berlian, menegaskan bahwa “sebagian besar tim dari era pemerintahan sebelumnya masih aktif mendukung Ibu Lidyawati dan Pak Haryanto, terutama di wilayah yang sudah merasakan dampak program seperti berobat gratis” (Wawancara, 28 April 2025). Identitas pasangan ini digunakan sebagai instrumen kesinambungan program dan penguatan jaringan elektoral.

Ketiga pasangan calon menunjukkan bahwa identitas dapat dioperasionalkan secara strategis sesuai dengan kebutuhan politik masing-masing. Yulius Maulana dan Budiarto Marsul menggunakan identitas daerah secara inklusif untuk membentuk kepercayaan lintas dapil. Bursah Zarnubi dan Widia Ningsih memanfaatkan identitas sebagai simbol

kebersamaan dan sebagai media komunikasi kebijakan. Lidyawati dan Haryanto memposisikan identitas sebagai simbol keberlanjutan pemerintahan dan penguat jejaring kekuasaan sebelumnya.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa strategi instrumentalisme tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial politik yang melingkupinya. Keberhasilan memanfaatkan identitas sebagai alat politik praktis sangat bergantung pada sejauh mana pasangan calon mampu menyeimbangkan antara simbolisme, substansi, dan penerimaan publik.

Dengan demikian, dalam Pilkada Kabupaten Lahat 2024, dimensi instrumentalisme menjadi elemen kunci dalam membentuk efektivitas kampanye berbasis identitas. Identitas tidak lagi bersifat pasif sebagai label warisan, tetapi menjadi aktif sebagai alat politik yang dapat dirancang, disampaikan, dan disesuaikan dengan kepentingan elektoral secara dinamis.

Efektivitas Strategi Politik Identitas bagi Tiap Pasangan Calon

Strategi politik identitas yang diterapkan oleh masing-masing pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Lahat 2024 menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan, daya jangkau, dan respons masyarakat. Efektivitas dari strategi ini tidak hanya diukur dari penggunaan simbol dan narasi, tetapi juga dari dampaknya terhadap elektabilitas, persepsi publik, serta sejauh mana strategi tersebut dapat meningkatkan loyalitas dan dukungan dari pemilih lintas wilayah. Melalui pendekatan analisis komparatif terhadap tiga dimensi teori politik identitas yakni primordialisme, konstruksionalisme, dan instrumentalisme dapat dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberhasilan masing-masing pasangan calon dalam memanfaatkan identitas politik.

Pasangan calon Yulius Maulana – Budiarto Marsul menggunakan pendekatan politik identitas yang berakar pada latar belakang geografis sebagai putra daerah. Penekanan terhadap asal-usul dari Kikim Barat dan Tanjung Sakti disertai pelibatan tokoh lokal di berbagai dapil menjadi kekuatan utama strategi pasangan ini. Dalam wawancara dengan Samsul Hadi, tokoh masyarakat dari Kecamatan Lahat Selatan, dijelaskan bahwa “masyarakat merasa pasangan ini dekat karena memang berasal dari lingkungan yang sama dan selama ini hadir dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan” (Wawancara, 25 April 2025). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa persepsi kedekatan emosional menjadi fondasi elektabilitas pasangan ini di wilayah asal.

Namun, strategi identitas Yulius–Budiarto belum menunjukkan keberhasilan merata di seluruh wilayah Kabupaten Lahat. Berdasarkan pengamatan Dewi Anggraini, aktivis perempuan dari Kecamatan Gumay Talang, “pendekatan pasangan ini terlalu mengakar pada basis lokal tertentu, sehingga di beberapa kecamatan terasa kurang intensif dalam komunikasi dan program” (Wawancara, 27 April 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa keunggulan berbasis identitas lokal perlu diimbangi dengan perluasan komunikasi politik secara lintas dapil.

Sebaliknya, pasangan Bursah Zarnubi – Widia Ningsih tampil dengan strategi politik identitas yang lebih terstruktur dan inklusif. Slogan “Jeme Kite” dikombinasikan dengan representasi gender, usia, dan latar belakang sosial telah membentuk persepsi bahwa pasangan ini merupakan figur dari semua kalangan. Menurut Rahman Suyatno, tokoh adat dari Kecamatan Merapi Timur, “slogan itu hidup di masyarakat. Tidak hanya simbolik, tetapi juga menggambarkan bahwa pasangan ini memang dari kita dan untuk kita” (Wawancara, 24 April 2025). Ini memperkuat citra bahwa identitas yang dibawa pasangan Bursah–Widia diterima luas dan mampu membentuk loyalitas lintas kelompok.

Dalam konteks konstruksionalisme, pasangan Bursah–Widia menunjukkan keberhasilan dalam mengintegrasikan simbol identitas dengan narasi kebijakan. Penggunaan media sosial, kampanye partisipatif, serta komunikasi berbasis budaya lokal memperkuat persepsi otentisitas dan profesionalisme. Berdasarkan pernyataan Lina Septiana, kader perempuan muda dari Kecamatan Pseksu, “akun kampanye mereka tidak hanya bicara janji, tapi menyampaikan kegiatan nyata dan respon dari masyarakat. Hal ini membuat saya merasa tidak sedang melihat pencitraan, tapi kerja nyata” (Wawancara, 26 April 2025). Komentar ini menggambarkan bahwa citra pasangan Bursah–Widia sebagai figur yang komunikatif dan representatif mampu meningkatkan elektabilitas secara signifikan.

Pasangan calon Lidyawati – Haryanto mengedepankan strategi identitas yang didasarkan pada keberlanjutan pemerintahan sebelumnya. Kedekatan Lidyawati dengan masyarakat melalui peran sosial sebagai istri bupati dan posisi Haryanto sebagai wakil bupati menjadi dasar dalam membangun citra pasangan ini. Teguh Armanda, koordinator tim relawan dari Kecamatan Jarai, menyebut bahwa “program berobat gratis yang dilaksanakan pada masa Cik Ujang digunakan kembali oleh tim kampanye Lidyawati sebagai bukti keberpihakan kepada rakyat” (Wawancara, 27 April 2025). Dengan

demikian, pasangan ini memanfaatkan legitimasi birokratis sebagai bagian dari konstruksi identitas elektoral.

Akan tetapi, pendekatan pasangan Lidyawati–Haryanto menghadapi tantangan, terutama di wilayah yang tidak merasakan langsung dampak kebijakan pemerintahan sebelumnya. Dalam wawancara, Yusran Darmawan, tokoh masyarakat dari Kecamatan Kikim Barat, menyampaikan bahwa “tidak semua masyarakat melihat program masa lalu sebagai dasar memilih. Banyak yang masih bertanya, apakah pemimpin baru akan memberi perubahan, bukan hanya melanjutkan” (Wawancara, 28 April 2025). Hal ini mencerminkan bahwa penggunaan identitas berbasis kekuasaan tidak selalu efektif di hadapan pemilih yang lebih rasional dan progresif.

Dalam aspek instrumentalisme, pasangan Lidyawati–Haryanto menunjukkan keunggulan dalam mempertahankan basis dukungan lama dan jaringan struktural. Penggunaan simbol-simbol warisan kekuasaan dipadukan dengan narasi “lanjutkan” memberi penguatan bagi kelompok yang menginginkan stabilitas pemerintahan. Namun, persepsi negatif tentang politik dinasti dan dominasi elite menjadi tantangan tersendiri dalam menjangkau pemilih muda dan masyarakat kritis. Menurut Ahmad Tarmizi, mahasiswa aktif dari Kecamatan Muara Payang, “banyak pemuda menganggap pasangan ini terlalu elitis dan kurang membumi. Identitas lokal yang dibawa justru terasa seperti pengulangan, bukan pembaruan” (Wawancara, 26 April 2025).

Sementara pasangan Yulius–Budiarto lebih kuat di basis loyalitas lokal dan komunitas adat, pasangan Bursah–Widia unggul dalam mengintegrasikan simbol identitas dengan program kebijakan. Adapun pasangan Lidyawati–Haryanto memperoleh kekuatan dari jaringan kekuasaan dan keberlanjutan program, tetapi menghadapi resistensi di beberapa segmen pemilih. Keberhasilan strategi identitas sangat ditentukan oleh kemampuan pasangan calon dalam menyesuaikan pendekatan mereka terhadap karakteristik sosial, budaya, dan demografis di setiap wilayah.

Berikut ini disajikan tabel 4.2 yaitu, evaluasi komparatif strategi politik identitas berdasarkan tiga dimensi teori Van den Berghe untuk masing-masing pasangan calon:

Tabel 2. Evaluasi Efektivitas Politik Identitas Tiga Pasangan Calon Pilkada Lahat 2024

Dimensi	Yulius Budiarto	Bursah – Widia	Lidyawati Haryanto
Primordialisme	Kuat di basis asal (Kikim Barat & Tanjung Sakti). kedekatan emosional dengan komunitas lokal	Simbol “Jeme Kite” memperkuat ikatan kolektif dan lintas wilayah	Figur Haryanto kuat secara lokal, Lidyawati bergantung pada warisan Cik Ujang
Konstruksionalisme	Tokoh masyarakat lintas dapat dilibatkan, narasi perubahan digunakan	Komposisi pasangan inklusif, kampanye aktif dan berbasis budaya	Identitas dibangun melalui narasi keberlanjutan program pemerintahan sebelumnya
Instrumentalisme	Identitas digunakan untuk memperkuat loyalitas pemilih tradisional, tidak eksklusif	Identitas digunakan sebagai alat komunikasi program dan strategi jangka panjang	Identitas digunakan sebagai instrumen kesinambungan kekuasaan, tantangan resistensi publik
Kelebihan	Autentik, dekat dengan masyarakat lokal	Inklusif, adaptif, programatik, kuat secara digital	Jaringan kuat, basis loyal sudah terbentuk
Kelemahan	Terbatas pada wilayah tertentu, kurang jangkauan simbolik	Rentan pada over-personalisasi jika tidak dijaga	Persepsi politik dinasti dan tantangan penerimaan terhadap calon perempuan

(Sumber: Diolah Penulis, 2025)

Berdasarkan analisis dan data lapangan, pasangan Bursah–Widia memiliki tingkat efektivitas paling merata dalam pemanfaatan politik identitas secara strategis, simbolik, dan praktis. Pasangan Yulius–Budiarto unggul dalam aspek emosional di wilayah asal, tetapi kurang dalam distribusi simbol yang luas. Sedangkan pasangan Lidyawati–Haryanto memiliki kekuatan struktural, tetapi menghadapi tantangan dalam membangun persepsi pembaruan dan inklusivitas.

Efektivitas strategi politik identitas tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial-politik lokal. Oleh karena itu, pasangan calon yang berhasil menyeimbangkan antara simbol, substansi, dan komunikasi dua arah dengan masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh legitimasi elektoral yang kuat.

Dampak Politik Identitas terhadap Dinamika Sosial Masyarakat Kabupaten Lahat

Politik identitas dalam Pilkada Kabupaten Lahat tahun 2024 hadir sebagai strategi yang menonjol dari ketiga pasangan calon kepala daerah. Berbeda dengan asumsi umum bahwa politik identitas kerap menimbulkan polarisasi sosial, dalam konteks lokal Kabupaten Lahat, strategi ini justru memiliki kecenderungan memperkuat solidaritas dan kohesi sosial. Namun demikian, sejumlah dinamika sosial tetap muncul, terutama berkaitan dengan persepsi terhadap kepemimpinan perempuan dan potensi eksklusivisme identitas.

Secara umum, mayoritas informan menyatakan bahwa strategi politik identitas yang digunakan dalam Pilkada ini tidak menciptakan gesekan antar masyarakat. Hartono, Ketua Koordinator Kecamatan Pagar Gunung, menyampaikan bahwa tidak terdapat resistensi masyarakat terhadap simbol-simbol lokal dalam kampanye. Menurut Hartono, penggunaan identitas daerah justru “menjadi penguat kedekatan dengan masyarakat, bukan pemicu konflik atau kecemburuan sosial” (Wawancara, 28 April 2025).

Hal senada diungkapkan oleh Syukron Oktadiansyah, Bendahara DPD Partai Golkar Kabupaten Lahat, yang menjelaskan bahwa narasi lokal “Jeme Kite” yang dibawa pasangan Bursah–Widia menjadi simbol yang menyatukan masyarakat, bukan yang memisahkan. Dalam pernyataannya, Syukron menegaskan, “slogan itu hidup dan melekat dalam keseharian masyarakat serta menjadi bagian dari kearifan lokal yang terus dilestarikan” (Wawancara, 23 April 2025).

Muhammad Sangkut, Sekretaris Timses Dapil 4 dari PKS, menyampaikan bahwa masyarakat lebih fokus pada pengalaman dan kompetensi calon daripada latar belakang etnis atau daerah. “Yang penting bagi pemilih sekarang itu program dan karakter pemimpin, bukan sekadar asal usul,” ujarnya (Wawancara, 26 April 2025). Pendapat ini mengindikasikan bahwa masyarakat Lahat semakin rasional dalam merespons kampanye politik, termasuk yang memanfaatkan identitas lokal.

Namun, resistensi tetap terjadi di beberapa wilayah, terutama terkait pencalonan perempuan sebagai kepala daerah. Umi Parizal, kader DPAC Partai Demokrat Kecamatan Tanjung Tebat, menyampaikan adanya keraguan sebagian masyarakat terhadap kemampuan Lidyawati memimpin. “Ada sebagian masyarakat yang menolak karena belum siap dipimpin oleh sosok perempuan,” ungkapnya (Wawancara, 25 April 2025).

Penolakan ini bersifat kultural dan cenderung hadir di wilayah dengan nilai-nilai patriarkis yang masih kuat.

Resistensi terhadap calon perempuan juga diungkapkan oleh Yani Mustika, kader perempuan dari Kecamatan Kota Agung. Menurut Yani, banyak masyarakat desa yang mempertanyakan apakah perempuan cocok menjadi pemimpin. “Bukan karena tidak mampu, tapi karena masyarakat belum terbiasa melihat perempuan menjadi kepala daerah,” katanya (Wawancara, 28 April 2025). Hal ini menunjukkan bahwa strategi politik identitas yang melibatkan gender belum sepenuhnya diterima di beberapa lapisan masyarakat.

Namun, terdapat pula informan yang melihat kehadiran calon perempuan sebagai bentuk kemajuan sosial. Iskandar Zuhri, tokoh pemuda dari Kecamatan Tanjung Tebat, mengatakan bahwa Lidyawati telah lama aktif dalam kegiatan sosial sehingga sudah dikenal oleh masyarakat. “Ibu Lidyawati sering hadir di kegiatan masyarakat, bukan sekadar mendampingi suami, tapi sebagai pelaku aktif,” ujarnya (Wawancara, 27 April 2025). Hal ini memperkuat legitimasi sosial Lidyawati di luar statusnya sebagai istri mantan bupati.

Windo Raja Saputra, kader Demokrat dari Kecamatan Kota Agung, juga menyampaikan bahwa kedekatan Lidyawati dengan masyarakat dibentuk dari keterlibatannya langsung dalam kegiatan pelayanan sosial. Menurutnya, masyarakat mulai menerima gagasan kepemimpinan perempuan karena melihat bukti nyata dari partisipasi Lidyawati dalam pengelolaan pemerintahan sebelumnya (Wawancara, 26 April 2025).

Pendapat lain datang dari Elga Yandrasyah, Ketua Koordinator Kecamatan Kota Agung dari PKB, yang menyatakan bahwa pasangan Bursah–Widia berhasil membangun narasi keterwakilan inklusif. “Komposisi pasangan ini mewakili semua kalangan: perempuan, pemuda, dan masyarakat desa,” ujarnya (Wawancara, 27 April 2025). Hal ini menunjukkan bahwa identitas digunakan untuk merangkul, bukan untuk menyekat.

Jalaludin, Bendahara Tim YMBM Dapil 4, menjelaskan bahwa Yulius Maulana dan Budiarto Marsul dikenal baik oleh masyarakat setempat. “Pak Budiarto dikenal luas karena pernah menjabat wakil wali kota dan DPRD provinsi. Itu membuat masyarakat lebih percaya karena beliau bukan orang baru,” tegasnya (Wawancara, 26 April 2025).

Legitimasi yang dibangun dari pengalaman politik menjadi bentuk lain dari identitas yang diterima masyarakat.

Rina Sulastri, kader perempuan dari Kecamatan Tanjung Sakti PUMI, menyampaikan bahwa masyarakat sangat mempertimbangkan siapa yang berasal dari daerah mereka. “Kedekatan itu penting, tapi juga harus dibuktikan lewat tindakan,” ujarnya (Wawancara, 26 April 2025). Ini menunjukkan bahwa identitas tidak cukup hanya sebagai simbol, tetapi juga harus diiringi rekam jejak dan program konkret.

Toni Firmansyah, relawan muda dari Kecamatan Kikim Selatan, menilai bahwa pasangan Bursah–Widia berhasil menyentuh generasi muda melalui media sosial yang komunikatif dan membumi. “Media sosial mereka selalu pakai logat dusun, pakai bahasa lokal, jadi terasa lebih dekat dan tidak kaku,” ungkapnya (Wawancara, 24 April 2025). Strategi ini memperkuat kesan bahwa politik identitas dapat dirancang sesuai perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai lokal.

Lina Septiana, kader perempuan dari Kecamatan Pseksu, mengatakan bahwa informasi kampanye yang disampaikan oleh tim Bursah–Widia sangat mudah dipahami. “Mereka menyampaikan kegiatan nyata, bukan hanya janji politik. Masyarakat melihat itu sebagai bentuk kepedulian,” tegasnya (Wawancara, 26 April 2025). Hal ini memperkuat hubungan emosional antara pemilih dan pasangan calon.

Rahman Suyatno, tokoh adat dari Merapi Timur, mengungkapkan bahwa penggunaan simbol “Jeme Kite” justru menjadi kekuatan utama pasangan Bursah–Widia. “Slogan itu membuat masyarakat merasa memiliki,” katanya (Wawancara, 24 April 2025). Pernyataan ini mencerminkan bahwa simbol identitas mampu membangun rasa persatuan dalam masyarakat multikultural seperti Kabupaten Lahat.

Samsul Hadi, tokoh masyarakat dari Kecamatan Lahat Selatan, menilai bahwa pendekatan pasangan Yulius–Budiarto sangat efektif dalam membangun hubungan emosional dengan pemilih. “Masyarakat merasa pasangan ini dekat karena memang berasal dari lingkungan yang sama dan selama ini hadir dalam kegiatan kemasyarakatan,” jelasnya (Wawancara, 25 April 2025).

Dewi Anggraini, aktivis perempuan dari Kecamatan Gumay Talang, menyatakan bahwa pendekatan pasangan Yulius–Budiarto terlalu fokus pada basis lokal tertentu. “Di beberapa kecamatan terasa kurang intensif dalam komunikasi dan program,” ungkapnya

(Wawancara, 27 April 2025). Ini menunjukkan bahwa strategi identitas yang sempit justru bisa membatasi jangkauan dukungan.

Yusran Darmawan, tokoh masyarakat dari Kecamatan Kikim Barat, menyampaikan bahwa program masa lalu tidak selalu menjamin loyalitas pemilih. “Banyak yang masih bertanya, apakah pemimpin baru akan memberi perubahan, bukan hanya melanjutkan,” katanya (Wawancara, 28 April 2025). Hal ini mencerminkan perlunya pembaruan dalam narasi politik, bukan hanya mengandalkan kesinambungan.

Ahmad Tarmizi, mahasiswa aktif dari Kecamatan Muara Payang, menganggap pasangan Lidyawati–Haryanto terlalu elitis. “Banyak pemuda menganggap pasangan ini terlalu elitis dan kurang membumi,” ujarnya (Wawancara, 26 April 2025). Pernyataan ini menekankan perlunya keterlibatan langsung dan komunikasi dua arah, terutama kepada segmen pemilih muda.

Dengan mempertimbangkan seluruh kutipan wawancara dari berbagai informan dan latar belakang sosial, dapat disimpulkan bahwa strategi politik identitas dalam Pilkada Kabupaten Lahat tahun 2024 cenderung berdampak positif terhadap dinamika sosial masyarakat. Meskipun terdapat tantangan resistensi terhadap figur perempuan pada sebagian wilayah, fenomena tersebut tidak berkembang menjadi konflik terbuka atau perpecahan horizontal. Sebaliknya, pendekatan identitas yang inklusif, komunikatif, dan berbasis kultural justru memperkuat rasa solidaritas dan kohesi sosial antarkomunitas. Oleh karena itu, strategi politik identitas yang dijalankan secara proporsional dapat menjadi instrumen demokratis yang bukan hanya mendekatkan calon dengan pemilih, tetapi juga memelihara harmoni sosial dalam konteks keberagaman masyarakat lokal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dan hasil wawancara yang telah diperoleh di lapangan dalam menganalisis efektivitas penggunaan politik identitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lahat tahun 2024, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

Strategi politik identitas digunakan oleh ketiga pasangan calon kepala daerah sebagai instrumen kampanye dengan pendekatan yang beragam. Paslon Yulius Maulana – Budiarto Marsul mengedepankan narasi sebagai “putra daerah” untuk membangun kedekatan emosional, khususnya di wilayah asal mereka. Paslon Bursah Zarnubi – Widia Ningsih menggunakan slogan “Jeme Kite” sebagai simbol inklusif yang mampu

menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Adapun Paslon Lidyawati – Haryanto mengandalkan narasi keberlanjutan pemerintahan sebelumnya dan legitimasi sosial yang dibangun melalui peran birokratis dan kegiatan sosial. Ketiga pasangan calon secara sadar memanfaatkan dimensi politik identitas baik primordialisme, konstruksionalisme, maupun instrumentalisme untuk meningkatkan elektabilitas dan loyalitas pemilih. Penggunaan identitas tersebut tidak bersifat eksklusif, namun tetap ada resistensi di beberapa wilayah terhadap pencalonan perempuan sebagai kepala daerah.

Secara umum, strategi politik identitas yang dijalankan dalam Pilkada Kabupaten Lahat tahun 2024 tidak menimbulkan konflik atau perpecahan sosial yang signifikan. Justru sebaliknya, identitas lokal yang dibangun secara inklusif mampu memperkuat kohesi sosial dan semangat kebersamaan antar komunitas. Narasi kebudayaan lokal, slogan berbasis kesamaan daerah, serta pendekatan partisipatif menciptakan ruang komunikasi yang harmonis antara calon dan masyarakat. Meski demikian, dinamika sosial seperti resistensi berbasis gender dan persepsi politik dinasti tetap menjadi tantangan tersendiri, khususnya terhadap pasangan calon perempuan. Namun secara keseluruhan, politik identitas yang dijalankan secara etis, proporsional, dan adaptif telah berhasil menjadi strategi efektif dalam memperkuat hubungan antara pemimpin politik dan masyarakat Kabupaten Lahat.

DAFTAR PUSTAKA

- A Pearce II Jhon. Richard B. Robinson Jr. (2013). *Manajemen Strategis : Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*, Terj. Nia Pramita Sari. Jakarta : Salemba Empat.
- Abdillah, M. (2002). *Teori politik dan sistem pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Ainun, N., Indah, N., & Siregar, F. A. (2022). Politik Identitas Etnis dalam Pilkada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. *Jurnal Prosiding Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Dharmawangsa.
- Akhmad, Z., Hasran, H., & Rahman, R. (2022). Pengaruh Kepemimpinan dalam Peningkatan Motivasi Kerja PNS di Kantor Kecamatan. *Journal of Government Insight*, 2(2), 182–197.
- Akinyetun, T. S. (2020). The role of economic disparity in political identity formation. *Political Studies Review*, 18(3), 235-252.
- Ali, M. (2023). *Politik Identitas dan Pemilu: Kajian Etnopolitik di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ariyani, D., Noerzaman, A., & Usni. (2021). Politik Identitas Dibalik Panggung Pilkadaes. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*.
- Aswir, F. B., & Bakri, L. S. (2019). Politik Identitas di Pilkada Maluku Utara 2013. *KAWASA Journal*.

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat. (n.d.). Diakses pada 10 Februari 2025, dari <https://bpbdkablahaat.wordpress.com/>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat. (2024). Kabupaten Lahat dalam Angka
- Barth, F. (1988). *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*. Waveland Press.
- Belladina. (2023). *Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Pada Peningkatan Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2024*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Bernstein, M. (2002). Identity Politics and Social Movements. *Annual Review of Sociology*, 26, 47-71.
- Brown, D. (1989). *Ethnic Revival: Perspectives on State and Society*. Cambridge University Press.
- Buchari, I. (2014). *Ketimpangan Sosial dan Dampaknya terhadap Stabilitas Politik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Budiardjo, M. (2011). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Damanik, R. (2020). *Politik Identitas dalam Regulasi Pemerintah*. Jakarta: Pustaka Rakyat.
- David, F. (2009). *Manajemen streategi : konsep edisi keduabelas*. Jakarta: Pt. Indeks.
- Dinas Energi dan Pertambangan Kabupaten Lahat. (2014). Lahat: Dinas Energi dan Pertambangan Kabupaten Lahat.
- Drucker, Feter F. (1999). *Management Challenges for The 21 st Century*. New Delhi: Butterworth-Heneiman.
- Dwiyanto, A., dkk. (2006). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Fox, J., & Menchik, J. (2011). Religious and Ethnic Politics in Electoral Campaigns. *Journal of Political Studies*, 19(2), 120-135.
- Gaffar, A. (1999). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Graceylla, R. (2023). *Pengaruh Politik Identitas Terhadap Kemenangan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sintang*. Skripsi Fakultas Politik dan Pemerintahan, IPDN.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. PT Bumi Aksara.
- Hefner, R. W. (2007). *The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Indonesia*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Heller, A. (1995). *The Concept of Political Identity*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kartono, K. (2004). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- KPU. (2024). *Profil pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat 2024*. Diakses pada 18 Februari 2025 dari <https://pilkada2024.kpu.go.id/>
- Lestari, T. (2018). *Tata Kelola Pemerintahan dan Efektivitas Politik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2005). *Qualitative Data Analysis* (terjemahan). UI Press.
- Muhammad, G. (2022). *Peran Politik Identitas Berbasis Etnis dan Latar Belakang Pasangan Calon Mempengaruhi Pemilihan Wali Kota Medan Tahun 2020*. Skripsi Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Nugroho, D. R. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Pahlevi, Indra. (2015). *Pemilu Serentak dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI, 2015).
- Putra. (2024). *Anak Muda Lahat Didorong Pilih Bursah Zarnubi dan Widia Ningsih*. Crurstimes.com.
- Rahman, R. (2023). Analisis Gaya Kepemimpinan Bupati dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Birokrasi. *Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik*, 13(1).
- Ramlan Surbakti, Ramlan. (2021). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Sosial dan Politik*. Bandung: Alfabeta.
- Suparlan, P. (2004). *Identitas Sosial dan Politik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Thoha, M. (2008). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Van Den Berghe, P. L. (1987). *The Ethnic Phenomenon*. Praeger.
- Widayanti, S. (2009). *Konsep Politik Identitas dalam Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yardin, A. (2023). Mengurai Pengaruh Politik Identitas Etnis: Sukses Etnis Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Politik dan Demokrasi*, 1(1).
- Yoki. (2024). *Di Rafika 3, Bursah Zarnubi Hadiri Arisan Keluarga Kikim Area*. Liputan4.com.
- Zuriah, N. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Rosdakarya.